

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DAERAH RIAU¹

Almasdi Syahza², Shorea Khaswarina³
Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Universitas Riau

Email: asyahza@yahoo.co.id; syahza@telkom.net

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

ABSTRAK

Sejak krisis ekonomi dimulai pada pertengahan tahun 1997, sektor perkebunan merupakan penyelamat bagi petani perkebunan khususnya petani kelapa sawit. Pada saat krisis tersebut harga tandan buah segar (TBS) meningkat tajam, ini merangsang perusahaan perkebunan maupun petani swadaya untuk melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan petani di pedesaan. Analisis dilakukan dengan perhitungan indek kesejahteraan. Berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya. Indek pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 2003 sebesar 1,74, pada tahun 2006 sebesar 0,23. Ini berarti kesejahteraan petani kelapa sawit selalu meningkat.

Kata kunci: Kelapa sawit, indek kesejahteraan

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Riau mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan sebagai salah satu alternatif pembangunan ekonomi pedesaan. Komoditi yang dikembangkan adalah kelapa sawit sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2002a).

¹ Telah dipublikasikan dalam *Jurnal Sorot*, Vol 1 No 2, Oktober 2007, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

² Kepala Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPKPEM) Universitas Riau. Staf pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau.

³ Staf pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat pendatang (transmigrasi), karena program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada awalnya dikaitkan dengan program transmigrasi. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan tingginya mobilitas penduduk di daerah Riau terutama di daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena daerah Riau memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Dengan luas mencapai 1.312.661 ha pada akhir tahun 2003, maka daerah Riau mempunyai kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. (Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2003).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Almasdi Syahza, 2003a).

Menurut Bustanil Arifin (2001), potensi subsektor perkebunan untuk dijadikan andalan ekspor di masa-masa mendatang sangat besar. Prasyarat yang diperlukan hanyalah perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai hilir. Mustahil kinerja ekspor akan lebih baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola perdagangan, dan distribusi komoditas perkebunan domestik masih mengalami banyak hambatan dan distorsi harga.

Lebih lanjut Bungaran Saragih (2001) menyatakan, cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi nasional yang memberikan prioritas pada pengembangan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional. Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keperpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah: Apakah perkebunan kelapa sawit di daerah Riau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan? Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan dan strategi untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode *Case Study and Field Research* (penelitian kasus dan penelitian lapangan). Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Riau dengan pemilihan lokasi secara *Multistages cluster sampling* di wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit. Daerah terpilih adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Alasan pemilihan kedua kabupaten tersebut, antara lain: 1) dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi Riau, daerah tersebut merupakan bahagian dari pusat pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit; 2) umur kelapa sawit pada kedua daerah tersebut pada usia produksi optimum yaitu umur 10 sampai 16 tahun (baik produksi TBS, minyak sawit, dan inti sawit); 3) di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit ketiga kabupaten tersebut banyak masyarakat tempatan melakukan usahatani kelapa sawit secara swadaya; dan 5) dari ketiga kabupaten tersebut mempunyai produktivitas kebun yang berbeda.

Metode Penarikan Sampel

Sampel diambil dari masyarakat di daerah penelitian yang terpilih. Rumus untuk ukuran sampel adalah (Cochran. William G, 1991):

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} \left[1 + \frac{1}{N} \left(\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} - 1 \right) \right]$$

Keterangan: n adalah ukuran sampel; P merupakan proporsi dari masing-masing kelompok sampel (plasma dan swadaya) pada kelas yang terpilih; sedangkan Q = 1 - P. N adalah ukuran populasi; Z adalah nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang diinginkan, dan d = standar error. Penelitian ini menggunakan batas probabilitas keyakinan sebesar 95 persen.

Pada masing-masing cluster yang terpilih, diambil dua macam responden, yaitu responden dari peserta plasma kelapa sawit (BUMN atau perusahaan swasta) dan responden dari daerah sekitarnya (masyarakat tempatan) yang melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit (swadaya murni).

Dari masing-masing daerah terpilih sebagai sampel, ditentukan proporsi (P) dari masing-masing kelompok sampel yaitu petani plasma dan petani swadaya. Hasil perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Petani Kelapa Sawit pada Daerah Sampel Tahun 2003

Kabupaten	Petani Kelapa Sawit (KK)		
	Plasma	Swadaya	Jumlah
Kampar	33.156	13.050	46.206
Rokan Hulu	9.335	32.559	41.894
Pelalawan	15.972	3.039	19.011
Jumlah	58.463	48.648	107.111
	54,6 %	45,4 %	100 %

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2003

Tingkat keyakinan penelitian ini adalah 95 % ($\alpha = 5 %$), dan diasumsikan datanya berdistribusi normal, sehingga diperoleh nilai z sebesar 1,96. Dengan menggunakan rumus Cochran, maka ukuran sampelnya sebesar 380 responden (Tabel 2).

Tabel 2. Ukuran Sampel pada Masing-masing Daerah Terpilih

P	Q	d	Z	n	Ukuran Sampel	
					Plasma	Swadaya
54,6%	45,4%	5%	1,96	380	271	109
Kabupaten Kampar				183	154	29
Kabupaten Rokan Hulu				115	43	72
Kabupaten Pelalawan				82	74	8

Sumber: Hasil olahan

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer yang diperlukan diperoleh langsung dari petani dan pemuka masyarakat. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait mencakup: jumlah petani kelapa sawit, luas lahan perkebunan (baik perkebunan besar swasta/BUMN maupun rakyat), produksi kelapa sawit, harga TBS, dan kelembagaan sosial ekonomi.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

Analisis Data

Guna mengetahui tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan pengujian dengan rumus sebagai berikut (Todaro, Michael P, 2000):

$$G = w_1 g_1 + w_2 g_2 + \dots + w_i g_i$$

G adalah indek pertumbuhan kesejahteraan sosial; **g_i** adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke *i*; dan **w_i** merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke *i*.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai indek pertumbuhan kesejahteraan (**G**) dari periode ke periode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan petani kelapa sawit sangat tergantung kepada umur tanaman. Semakin tinggi umur tanaman (umur optimum) menunjukkan kandungan minyak sawit dan inti sawit semakin tinggi, yaitu 21,87 % untuk minyak sawit dan 5,10 % untuk inti sawit. Tingginya kandungan minyak sawit yang dihasilkan oleh petani akan berpengaruh kepada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima oleh petani.

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan inti atau oleh pabrik kelapa sawit (PKS) berpedoman kepada harga CPO di pasar internasional. Untuk daerah Riau, khususnya bagi empat perusahaan besar (PT Perkebunan Nusantara V, PT Sinar Mas, PT. Astra, dan PT Asian Agri) harga TBS didasarkan kepada kesepakatan bersama yang ditentukan oleh Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian TBS (PPHP-TBS) Produksi Petani Propinsi Riau. Tim ini terdiri dari wakil dari masing-masing perusahaan, wakil dari petani, wakil dari pihak pemerintah yaitu dinas perkebunan.

Sebagai gambaran rata-rata harga TBS per semester berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Tim PPHP-TBS disajikan pada Tabel 3. Dari tabel itu memperlihatkan tingkat harga yang diterima oleh petani berdasarkan umur tanaman kelapa sawit. Karena itu penentuan harga yang ditetapkan oleh tim berpengaruh langsung kepada penerimaan petani kelapa sawit khususnya petani peserta plasma dari empat perusahaan besar perkebunan.

Hasil analisis penerimaan usahatani kelapa sawit disajikan pada Tabel 3. Dari hasil perhitungan memperlihatkan bahwa pendapatan petani plasma bersumber dari kelapa sawit sebesar Rp 1.911.993 per bulan (90,30%) dan non kelapa sawit sebesar Rp 252.310 per bulan (9,70 %). Sehingga total pendapatan petani plasma per bulan sebesar Rp 2.117.302 atau sebesar Rp 25.407.624,00 per tahun. Jika di asumsikan nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar UD \$ 1 = Rp 9.000, maka pendapatan petani plasma sebesar UD \$ 2.823,06 per tahun. Sementara pendapatan petani swadaya hanya sebesar Rp 1.807.679 per bulan atau Rp 21.692.154 ini setara dengan UD \$ 2.410,23 per tahun. Dalam proyeksi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau diharapkan pendapatan rata-rata petani per keluarga sebesar UD \$ 2.000,00 per tahun. Pada kenyataannya, hasil penelitian memperlihatkan pendapatan petani kelapa sawit diatas target proyek perkebunan.

Tabel 3. Perbandingan Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Plasma dengan Swadaya pada Umur Optimum (Rp)

Uraian	Petani		
	Plasma	Swadaya	Rataan
Pendapatan Sawit	1.911.993 (90,30)	1.411.679 (78,09)	1.788.312 (87,64)
Pendapatan Non Sawit	205.309 (9,70)	396.000 (21,91)	252.310 (12,36)
Total Pendapatan	2.117.302 (100)	1.807.679 (100)	2.040.622
Pengeluaran	1.187.273	1.171.104	1.183.288
Tabungan	225.093	87.500	191.180

Angka dalam kurung merupakan persentase sumber pendapatan

Sumber: Hasil olahan

Faktor penyebab tingginya tingkat pendapatan petani plasma adalah, antara lain: *Pertama*, Petani plasma sangat menggantungkan kehidupannya kepada hasil kebun mereka, ini terbukti kontribusi pendapatan kelapa sawit terhadap pendapatan keluarga sebesar 90,30 persen. Karena itu kegiatan usahatani kelapa sawit sangat serius dilakukan; *Kedua*, Petani plasma merupakan mitra kerja perusahaan inti. Petani plasma selalu mendapat binaan dari perusahaan inti menyangkut dengan pengelolaan kebun. Ini dibuktikan tingginya produktivitas kebun petani yaitu 1,78 ton per hektar per bulan atau 21,35 ton per tahun per hektar. Sedangkan petani swadaya produktivitas kebunnya sebesar 1,12 ton per hektar per bulan atau sebesar 13,44 ton per tahun per hektar; dan *ketiga*, harga yang diterima oleh petani plasma cukup tinggi dibandingkan dengan harga di tingkat petani swadaya.

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sampel mengungkapkan sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan pada umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Sebagai bahan perbandingan tingkat pendapatan antara petani kelapa sawit dengan jenis tanaman perkebunan lainnya yaitu kelapa dan karet disajikan pada Tabel 4. Pada tahun 1998 pendapatan petani kelapa sawit sebesar Rp 9.600.000 dan pendapatan petani kelapa hanya Rp 6.000.000 per tahun. Pada tahun 2000 pendapatan petani kelapa melonjak naik menjadi Rp 33.000.000 per tahun, sementara pendapatan petani kelapa sawit hanya mencapai Rp 15.680.000 per tahun. Mulai tahun 2002 pendapatan petani kelapa sawit selalu mengalami peningkatan, begitu juga pendapatan dari jenis perkebunan karet, sedangkan untuk pendapatan petani kelapa terus mengalami penurunan.

Tabel 4. Tingkat Pendapatan Rata-rata Petani Perkebunan Per Tahun (Rp)

Uraian	1998	1999	2000	2003	2005
Kelapa sawit	9.600.000	12.798.000	15.680.000	17.850.000	18.000.000
Kelapa	6.000.000	3.645.000	33.600.000	3.515.000	4.320.000
Karet	7.800.000	5.591.000	4.480.000	6.920.000	11.856.000
Rataan	7.800.000	7.344.667	17.920.000	9.428.333	11.392.000

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2005

Apabila dikaji dari struktur biaya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2004b) menemukan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit menciptakan angka pengganda (*multiplier effect*) sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248,00 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang,

perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (alsintan).

Pertumbuhan indeks kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen (Tabel 5). Dari itu terlihat pada 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar -1,09. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Tabel 5. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau

Kelompok Pendapatan	1995 ¹⁾		1998 ²⁾		2003 ³⁾		2006 ⁴⁾	
	w	g	w	g	w	g	w	g
20% terendah	0,0805	-0,0084	0,1513	0,0708	0,1169	-0,0344	0,1172	0,0003
20% terendah kedua	0,1266	0,0090	0,1946	0,0680	0,1583	-0,0363	0,1590	0,0007
20% terendah ketiga	0,1438	-0,0056	0,2152	0,0714	0,1831	-0,0321	0,1691	-0,0140
20% terendah keempat	0,1955	-0,0119	0,2010	0,0055	0,2107	0,0097	0,2340	0,0233
20% tertinggi	0,4535	0,0167	0,2379	-0,2156	0,3309	0,0930	0,3280	-0,0029
Indek Pertumbuhan Kesejahteraan	0,49		-1,09		1,72		0,23	

Sumber: 1) Almasdi Syahza, 1995
 2) Almasdi Syahza, 1998
 3) Almasdi Syahza, 2003
 4) Hasil survey, 2006

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 1,72 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 3,28 persen, sedangkan kelompok 60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar -1,56 persen. Namun pada tahun 2006 memperlihatkan indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit sangat dirasakan oleh kelompok pendapatan 40% terendah (miskin), ini dibuktikan dengan angka indeks pertumbuhan kesejahteraan bernilai positif 0,23. Kelompok berpenghasilan tertinggi (20% tertinggi) justru mengalami penurunan kesejahteraan.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2003b) menunjukkan, aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan

masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit baik dalam bentuk perusahaan maupun swadaya membutuhkan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat desa sekitarnya. Kegiatan perkebunan kelapa sawit ini menyerap tenaga kerja cukup banyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan.

Adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, khususnya pengadaan sarana prasarana menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat makin tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaan kebutuhan perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat. Ini merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pendapatan antara petani kelapa sawit plasma dengan swadaya. Perbedaan ini disebabkan, antara lain: 1) distorsi harga antara petani plasma dengan petani swadaya sebesar; 2) kemampuan petani swadaya terhadap pengelolaan kebun masih rendah; 3) pendapatan petani swadaya sangat dipengaruhi oleh harga TBS yang mereka terima karena pasar TBS lebih cenderung monopsonistik; dan 4) keterbatasan pengetahuan petani swadaya terhadap usahatani kelapa sawit.

Kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 2,48, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Tingkat pertumbuhan indek kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen. Tahun 2003 indek pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Hasil penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan menyimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Secara ekonomi akan menciptakan daya beli didaerah pedesaan, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat.

Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo

masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Dari sisi lain pembukaan perkebunan akan membutuhkan lahan, apabila hal ini tidak dikendalikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi alih fungsi lahan di daerah pedesaan.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Untuk merangsang investor melakukan investasi yang berbasis pedesaan, maka harus ada kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan investasi tersebut. Kebijakan itu antara lain; memperpendek rantai birokrasi perizinan; membebaskan PPN dalam jangka waktu tertentu; atau pengurangan pemotongan pajak penghasilan. Sehingga biaya produksi dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza,, 2002. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002. Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- , 2003a. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 2003b. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/02/November/2003. PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- , 2004a. Analisis Daya Dukung Wilayah Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit Di Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/01/Maret/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- , 2004b. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi Pedesaan, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Bungaran Saragih., 2001. *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Yayasan USESE, Bogor.
- Bustanul Arifin., 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Cochran, William G., 1991. *Teknik Penarikan Sampel*. UI-Press, Jakarta.
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau., 2003, *Laporan Tahunan*. Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Todaro, Michael P., 2000. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi ke tujuh. Erlangga, Jakarta.